

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum Kabupaten Kulon Progo

2.1 Kondisi Geografi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Empat Kabupaten dan Satu Kota, salah satu kabupaten tersebut adalah kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo adalah Kabupaten yang terletak pada wilayah Yogyakarta bagian barat dengan ibukota yang berada di kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat, dengan ibukota di Wates. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah 586.627,512 ha. Adapun batas wilayah kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Barat: Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah

Timur: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Utara: Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

Selatan: Samudera Hindia

Bagian utara merupakan dataran tinggi/perbukitan menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter dari permukaan laut dan meliputi kecamatan: Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Bagian tengah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100m-500m dari permukaan laut meliputi kecamatan sentolo, pengasih dan kokap.

2.2 Demografi:

2.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000-2013 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara umum mengalami pertumbuhan pada Tahun 2000 sebanyak 442.185 jiwa dengan perbandingan laki-laki 48,80% dan wanita 51,20%, menjadi pada 2013 sebanyak 416.209 jiwa dengan perbandingan laki-laki 49,63% dan wanita 50,37%.

Namun pada tahun 2010 dan 2013 secara administratif jumlah penduduk mengalami penurunan yang disebabkan pada tahun 2010 dilaksanakan pemutakhiran data penduduk dan pada tahun 2013 jumlah penduduk ditetapkan sesuai dengan hasil updating data terkait perekaman eKTP oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak terjadi duplikasi identitas penduduk di tempat lain dan penduduk yang telah meninggal teradministrasi. Jumlah penduduk secara administratif tersebut pada tahun 2013, bahkan lebih rendah dari angka tahun 2000 atau mengalami penurunan penduduk rata-rata 0,45% per tahun.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan basis data tahun 2000-2010 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,64% per tahun. Pemilihan basis

data tersebut, untuk mendapatkan angka pertumbuhan yang realistis, disebabkan terjadinya penurunan signifikan jumlah penduduk terkait kebijakan perekaman E-KTP.

Perbandingan jenis kelamin penduduk pada tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki 206.546 jiwa dan perempuan 209.663 jiwa. Angka sex ratio penduduk laki-laki sebesar 98, yang berarti terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk. Angka ini menunjukkan peningkatan komposisi jumlah penduduk laki-laki dari Tahun 2000 terdapat 95 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akses layanan terutama kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

2.3.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Apabila dilihat dari distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pengasih, Sentolo, dan Wates. Kepadatan penduduk kabupaten pada Tahun 2013 dengan rata-rata 709,93 jiwa/km². Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sebesar 1.420,03 jiwa/km²), tiga kali lebih padat dibanding Kecamatan Kalibawang yang memiliki kepadatan terendah 420,52 jiwa/km².

Hal ini disebabkan karena Kecamatan Wates merupakan pusat kegiatan dan pelayanan, namun memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Lendah dan Galur meskipun dari sisi jumlah penduduknya tidak sebanyak Kecamatan Sentolo dan Pengasih, namun kepadatannya penduduknya lebih tinggi.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Kulon Progo sejak Tahun 2000 yaitu: Kecamatan Wates, Lendah dan Galur.

2.4 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum setelah masa reformasi untuk pertama kalinya dibentuk pada pemerintahan Presiden ke 3 Republik Indonesia Burhanuddin Jusuf Habibie dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. Anggota dari Komisi Pemilihan Umum adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah yaitu sebanyak 53 anggota. KPU melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu Tahun 1999 dengan jumlah peserta pemilu yang cukup banyak pada saat itu sejumlah 48 partai.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya terbentuk pada tahun 2001 pada era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid dengan Keppres Nomor 10 Tahun 2001. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum pada saat itu adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum ketiga terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan Keppres Nomor 101 Tahun 2007. Anggota Komisi Pemilihan Umum pada saat ini adalah 7 (tujuh) orang yang melibatkan akademisi, peneliti dan birokrat. Sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu maka Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Hingga sekarang Komisi Pemilihan Umum telah mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 1999-2014. Selama itu pula Komisi Pemilihan Umum terus bertekad untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang independen dan terpercaya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten Kulon Progo. KPU Kabupaten Kulon Progo telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Pemilu Nasional, yaitu Pemilu Tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu pada tahun 2001, 2006, 2011, 2017. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum mulai tahun 2004 untuk tingkat kabupaten adalah 5 (lima) orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2018 dijabat oleh Muh Isnaini STP dan beranggotakan Marwanto, S.Sos ; Tri Mulatsih, S.Pd, MA ; Budi Priyana, S.Pt ; dan Panggih Widodo, S.Si.

2.4.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kulon Progo

VISI

1. Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.4.2 Tugas dan Wewenang KPU

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tugas dan Wewenang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

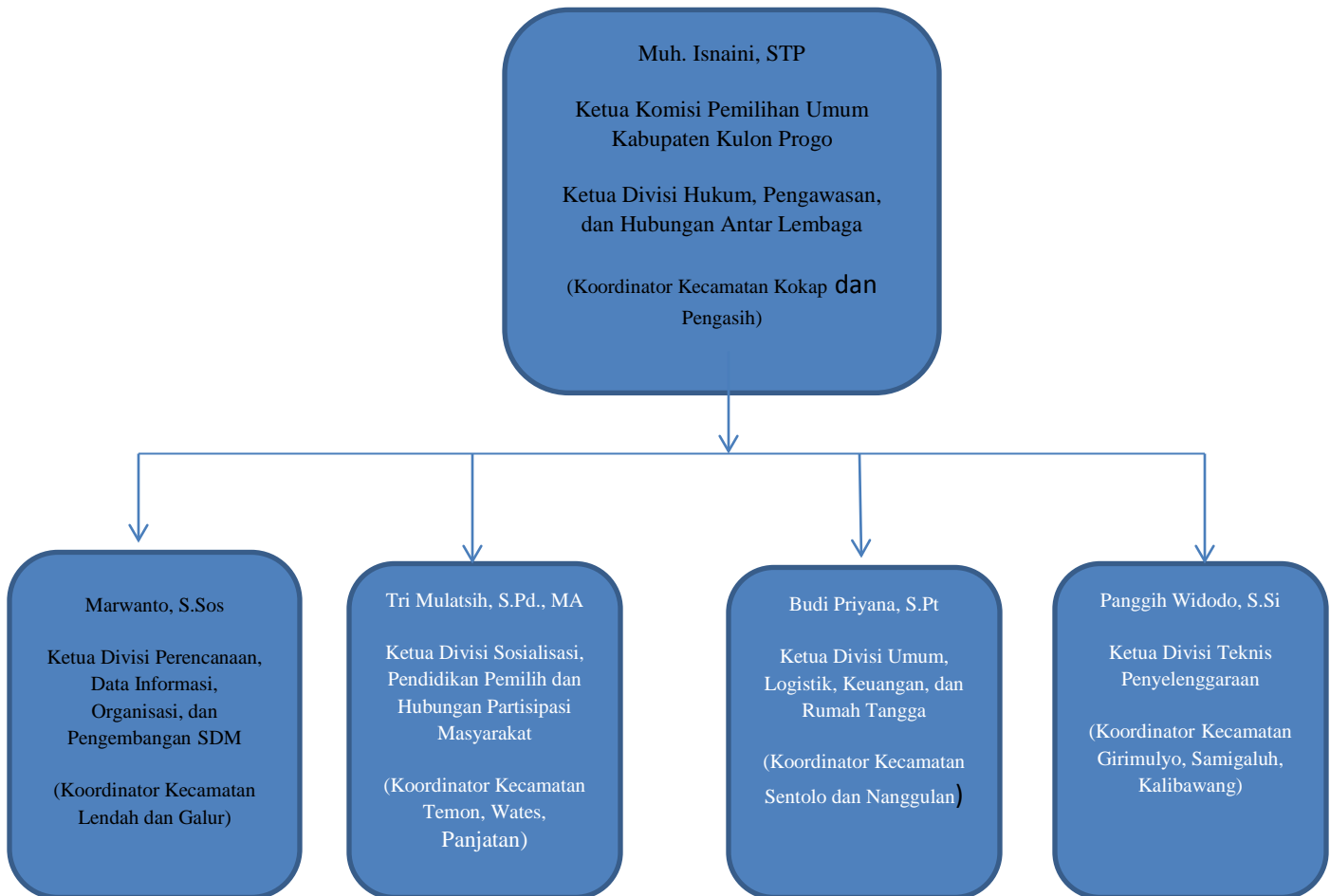
1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilukada.

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada dalam wilayah kerjanya.
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada.
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilukada terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilukada dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.
9. Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

11. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta wajib membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilukada dan mengumumkannya.
13. Mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya.
14. Melaporkan hasil Peilukada kepada KPU melalui KPU Provinsi.
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilukada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilukada.
20. Menyampaikan hasil Pemilukada kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten.

21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

2.4.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo



2.5 Sejarah Rumah Tahanan Kabupaten Kulon Progo

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates saat ini terletak di Ibukota Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kecamatan Wates dengan kondisi umum antara lain terletak di Sebelah Barat Alun-alun Wates, sebelah utara berbatasan langsung dengan SMP

Negeri 1 Wates, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kantor Dinas Kesehatan Kulon Progo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sanun yang mempunyai kapasitas 55 orang dengan Luas tanah 3.250 m², Luas Bangunan 2.646 m². Masing-masing digunakan untuk perkantoran 320 m² sedangkan untuk hunian warga binaan pemasyarakatan 346,8 m² yang dibagi menjadi beberapa ruangan antara lain :

1. Ruang. Nayataka digunakan untuk mapenaling
2. Ruang Badranaya I digunakan untuk Tahanan.
3. Ruang Badranaya II digunakan untuk Narapidana.
4. Ruang Ismaya digunakan untuk Tamping.
5. Ruang Janggan Asmarasanta untuk Tahanan/Narapidana wanita.

Sedangkan untuk Aula 140 m² sebagai tempat untuk bersosialisasi sekaligus hiburan dengan warga binaan pemasyarakatan, selain itu tempat yang difungsikan untuk kegiatan ketrampilan/ bimbingan kerja 49 m². Adapun sejarah singkat berdirinya RutanWates mulai dari tahun 1872 adalah :

1. Periode 1872-1905 sebagai tempat penampungan pidana pekerja paksa di tingkat bekas ibukota kabupaten (Arbeid straf).
2. Periode 1905-1921 sebagai penjara daerah Jogja selatan (Ketting kwartier).
3. Periode 1921-1942 sebagai penjara-penjara pidana (Strafgevangenissen).
4. Periode 1942-1945 sebagai penampungan tawanan tentara Indonesia.

5. Periode 1945-1950 sebagai penjara darurat pemerintah RI.
6. Periode 1950-1960 sebagai tempat resosialisasi.
7. Periode 1960-1963 sebagai periode kepenjaraan RI ke – 3.
8. Periode 1963-1966 dipinjam oleh penguasa militer untuk tahanan politik.
9. Periode 1966-1975 sebagai LP era Bina Tuna Marga.
10. Periode 1975 – sekarang kembali ke Pemasyarakatan.
11. Pimpinan dari waktu ke waktu antara lain :
12. Periode 1951 s.d. 1960 Bp. H. Warjonet
13. Periode 1960 s.d. 1968 Bp. S. Tjipto Wardoyo
14. Periode 1968 s.d. 1978 Bp. Soeharjo
15. Periode 1978 s.d. 1983 Bp. RM. Sindhu Krishno, Bc,IP. SH.
16. Periode 1983 s.d. 1988 Bp. Drs. Maksus HS
17. Periode 1988 s.d. 1993 Bp. Drs. Achmad Dhofir Ali
18. Periode 1993 s.d. 2000 Bp. Slamet Budihardjo, Bc,IP
19. Periode 2000 s.d. 2002 Bp. Drs. F. Haru Tamtomo, Bc,IP, Msi.
20. Periode 2002 s.d. 2007 Bp. Slamet Setiabudi Bc,IP

21.Periode 2007 s.d. 2008 Bp. Joko Pitoyo, Bc.IP, S.Sos.

22.Periode 2008 s.d. 2009 Bp. Drs. Rudy Djoko Sumitro, Bc.IP, SH

23.Periode 2009 s.d. 2012 Ibu Hj. Siti Istiqaroh, Bc.IP, SH.

24.Periode 2012 s.d 2015 Bp. Syamsir Alam Bc.IP

25.Periode 2015 s.d 2017 Bp. Hero Sulistiyono, Bc.IP, SH, MSi

26.Periode 2017 s.d sekarang Bp Soleh Joko Sutopo, A.Md.IP., S.H., M.H.

2.5.1 Visi dan Misi Rumah Tahanan Kelas IIB Wates

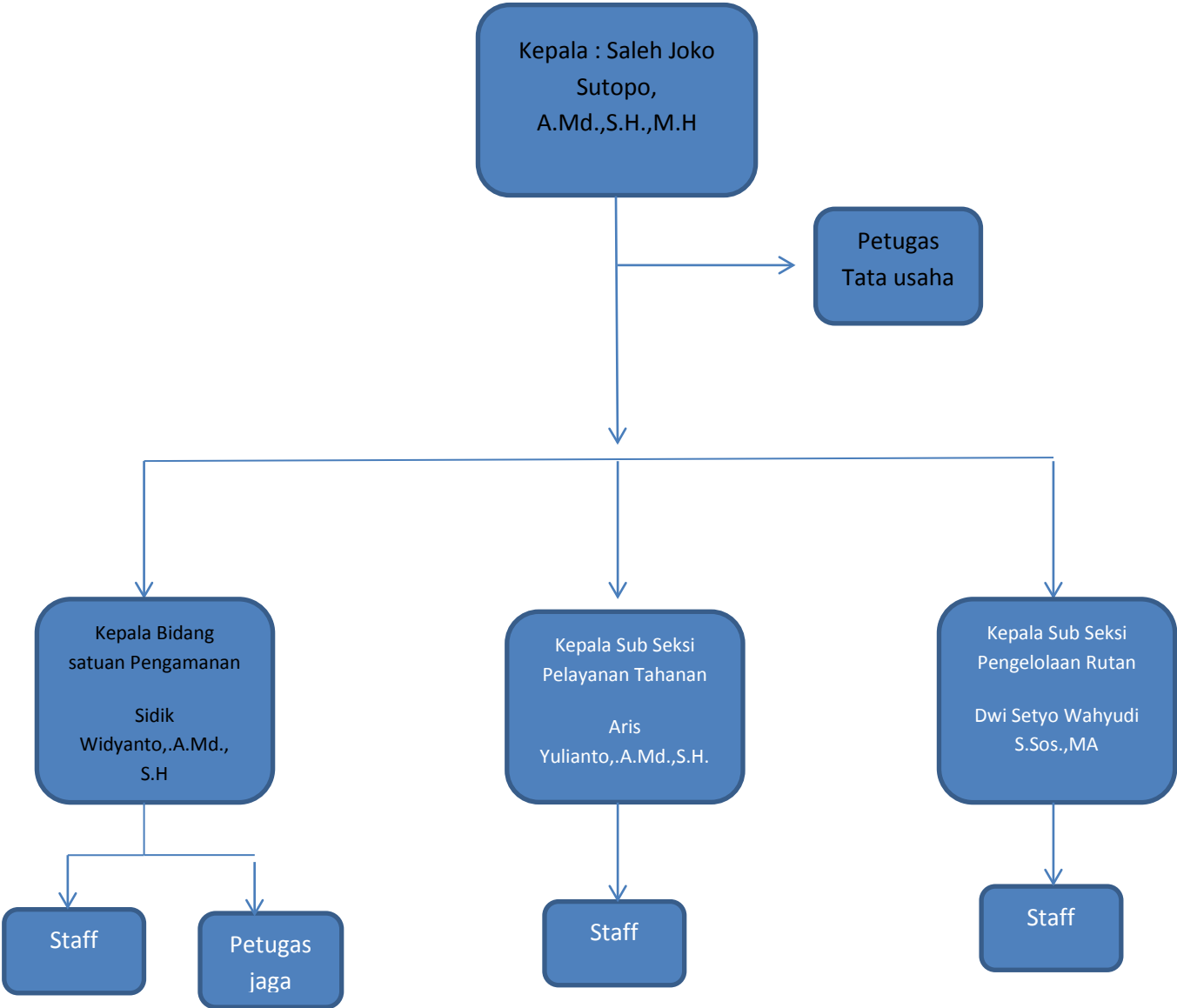
Visi

1. Memberikan pelayanan prima guna mewujudkan program reformasi birokrasi dan perlindungan hak asasi manusia menuju pemasyarakatan yang profesional

Misi

1. Melakukan perawatan, pelayanan, pembinaan tahanan/ narapidana dalam sistem pengamanan yang didukung dengan pengelolaan yang baik sehingga terwujud Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates yang aman dan tertib
2. dalam bingkai sistem pemasyarakatan

2.5.2 Struktur Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo



Profil Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB

No	Nama	Umur	Domisili	Jenis Kelamin
1	Adita Deka Pratama	26 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
2	Afak Fauzi	19 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
3	Agatha Kristanti	29 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
4	Agus Mantara	50 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
5	Agus Waskito	32 Tahun	Kulon Progo	Laki-Laki
6	Ahmad Romadon	34 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
7	Alrindo Putra	21 Tahun	Kulon Progo	Laki-Laki
8	Asbudi Triyanto	55 Tahun	Magelang	Laki-laki
9	Bambang Suhartono	21 Tahun	Jakarta	Laki-laki
10	Boedi Komandani	54 Tahun	Cilacap	Laki-laki
11	Budi Darminto	65 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
12	Budiharjo	50 Tahun	Mojokerto	Laki-laki
13	Budiyono	55 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
14	Chriz Munazar	36 Tahun	Kulom Progo	Laki-laki
15	Dannu Priyatno	31 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
16	Darmaji	42 Tahun	Kulon Progo	Laki-Laki
17	Dery Saputra	29 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki

18	Dibyو Wibowo	27 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
19	Didik Wahyu Hidayat	37 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
20	Edy Budi Priyatno	40 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
21	Elfantro	50 Tahun	Bantul	Laki-laki
22	Erni Yuli setyowati	47 tahun	Yogyakarta	Perempuan
23	Gimun	56 Tahin	Kulon Progo	Laki-laki
24	Gunarto	31 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
25	Hadi Sukisno	41 Tahun	Sleman	Laki-laki
26	Hanas arif Yuliandra	43 Tahun	Yogyakarta	Laki-laki
27	Haryanto	44 Tahun	Sleman	Laki-laki
28	Heri Dwi Asmanto	37 tahun	Kulon Progo	Laki-laki
29	Jupriati	45 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
30	Kamijan	44 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
31	Kamijoyo	45 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
32	Kasiati	43 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
33	Kaswadi	37 Tahun	Yogyakarta	Laki-laki
34	Lia mudwi antono	42 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
35	Lupiandika Karisnanda	41 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
36	Mahendra Setiawan	39 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
37	Moh. Shidiq Prabowo	42 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
38	Muchsin Ansori	29 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki

39	Muh Nurudin	26 Tahun	Purworejo	Laki-laki
40	Muh Yasir	32 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
41	Mukalim	46 Tahun	Kebumen	Laki-laki
42	Muryanto	54 Tahun	Cilacap	Laki-laki
43	Nur Marwanto	39 Tahun	Kebumen	Laki-laki
44	Nur Robi Wijaya	42 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
45	Oktavian Ctur Putra	41 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
46	Pamadi	34 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
47	Pardal	47 Tahun	Kebumen	Laki-laki
48	Pujianto	37 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
49	R Boko Jarwinto	42 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
50	R Rudatin suko	37 Tahun	Cilacap	Laki-laki
51	Raden Supriyanto	54 Tahun	Sleman	Laki-laki
52	Rangga Warsita	29 Tahun	Yogyakarta	Laki-laki
53	Rila Pambudi	32 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
54	Rusyianto	37 Tahun	Yogyakarta	Laki-laki
55	Salimin	43 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
56	Sapmoko	45 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
57	Sarini	41 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
58	Sarji	32 Tahun	Blora	Laki-laki
59	Sartono	38 Tahun	Sleman	Laki-laki

60	Sidik Handoko	19 Tahun	Cilacap	Laki-laki
61	Slamet Kusworo	42 Tahun	Sleman	Laki-laki
62	Sri Khasanah	36 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
63	Sri Lestari	33 Tahun	Kulon Progo	Perempuan
64	Sudaryanto	55 Tahun	Cilacap	Laki-laki
65	Suharno	54 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
66	Sukardiyanto	45 Tahun	Kebumen	Laki-laki
67	Sulistya Wibawa	39 Tahun	Sleman	Laki-laki
68	Sumiran	36 Tahun	Yogyakarta	Laki-laki
69	Suparjan	46 Tahun	Kulon Progo	Laki-laki
70	Suprih Rahayu	56 Tahun	Blora	Perempuan
71	Supriyatno	51 Tahun	Sleman	Laki-laki